



## Pemberdayaan Perempuan yang Multidimensi, Kunci Sukses Transisi Ekonomi Rendah Karbon

(Jakarta) 15 Maret 2018 - Program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan nasional sudah menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Namun, perlu ada lebih banyak studi yang mampu memberikan informasi strategis mengenai pemberdayaan perempuan di sektor-sektor pendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

“Masih sedikitnya kebijakan berbasis bukti yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan dalam ekonomi rendah karbon menjadi tantangan bagi para pengambil keputusan,” ujar Direktur Inklusi Sosial dan Gender Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia), Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz.

Informasi strategis inilah yang dibahas dalam penelitian yang digagas MCA-Indonesia serta dilaksanakan oleh Hivos South East Asia, lembaga kajian energi Enclude, dan jaringan peneliti energi terbarukan internasional Energia. Riset ini dilaksanakan pada Juni-Desember 2017 di delapan provinsi, yakni Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Studi ini mengkaji lansekap kebijakan pengarusutamaan gender dalam ekonomi rendah karbon dan mengidentifikasi keterhubungan antara upaya pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan gender dengan ekonomi hijau. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengurangan emisi karbon dan peningkatan kesetaraan gender. Namun, sinkronisasi kebijakan di dua aras tersebut perlu lebih ditingkatkan.

Selaras dengan itu, Sri Asih Rohmani, Peneliti Balitbang Kementerian Pertanian, menggarisbawahi pentingnya proses pengintegrasian pengarusutamaan gender di tiap kementerian yang terkait dengan ekonomi rendah karbon. “Di Kementerian Pertanian, pengarusutamaan gender berada di bawah eselon 1 sehingga menjadi lebih efektif dalam memastikan semua lini kementerian memainkan peranannya,” ucapnya.

Upaya pemberdayaan perempuan dalam ekonomi rendah karbon yang dikembangkan MCA-Indonesia berusaha mengembangkan model-model yang bisa diadaptasi sebagai acuan implementasi kebijakan rendah karbon dan kesetaraan gender. Hasil dari studi menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan yang multidimensi, seperti digagas oleh para penerima hibah Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia, secara signifikan menghasilkan manfaat ekonomi positif pada komunitas sasaran. Antara lain, ada perbaikan dalam praktek siklus penanaman, pemanfaatan lahan, serta meningkatnya peluang pasar.

Pemberdayaan multidimensi yang dimaksud tidak hanya menitikberatkan pada upaya peningkatan kapasitas perempuan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Studi ini merekomendasikan peningkatan peran perempuan sebagai pemimpin masyarakat dan agen perubahan pada upaya pengurangan emisi karbon di Indonesia, serta penyertaan konsep kesetaraan gender dalam prinsip dasar dan kondisi prasyarat ketahanan iklim nasional. Kajian ini juga menyarankan upaya memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap inovasi pembangunan rendah karbon yang berkesetaraan gender dalam bentuk kebijakan-kebijakan daerah. Rekomendasi lain ialah perlunya penguatan hubungan dan pemahaman konsep pembangunan rendah karbon antara pemerintah pusat dan daerah, di antaranya dengan pelatihan mengenai prinsip-prinsip ekonomi rendah karbon dan pengarusutamaan gender yang sesuai dengan konteks daerah. Terakhir, studi ini melihat

adanya potensi pengembangan ekowisata di mana 50 persen pelakunya adalah perempuan.

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, dalam pidato kunci dalam acara ini juga melihat perlunya pendekatan akses keadilan yang bersifat lintas disiplin ilmu terhadap pemberdayaan perempuan. “Upaya pemberdayaan perempuan harus dilakukan dengan pendekatan akses keadilan. Arah kebijakan harus dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang bersifat multi, inter, dan transdisiplin, untuk dapat merespon berbagai kebutuhan masyarakat di masa depan, terutama untuk pengentasan kemiskinan perempuan,” ujarnya.

Sebagai informasi, studi kualitatif ini mengumpulkan data melalui wawancara dan diskusi terfokus dengan para penerima manfaat program MCA-Indonesia. Studi juga dilengkapi dengan kajian dokumen kebijakan ekonomi rendah energi di Indonesia serta perbandingannya dengan kebijakan dan implementasi di beberapa negara lain. Selain itu, para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah pun diwawancarai untuk melihat hambatan dan tantangan dalam seluruh aras kebijakan ekonomi rendah karbon dan implementasinya di Indonesia.

Bidang yang dikaji meliputi energi terbarukan berbasis tenaga surya dan biogas, pertanian berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan perhutanan sosial. Dengan kajian yang terfokus pada beberapa proyek yang didukung MCA-Indonesia, studi ini memberi kesempatan untuk melakukan penilaian terhadap proyek percontohan yang terukur.

Temuan dan rekomendasi studi tersebut dipresentasikan oleh Tim Peneliti dari HIVOS, mitra MCA-Indonesia dalam studi ini, pada Dialog Kebijakan Publik hari ini yang mengundang para pemangku kepentingan di sektor ekonomi rendah karbon. Acara Dialog Kebijakan ini terdiri atas sesi paripurna, sesi diskusi, dan pemutaran dokumenter masyarakat khususnya perempuan yang telah mendapatkan akses energi dan memberikan manfaat bagi orang-orang serta lingkungan di sekitarnya.

#### **Tentang Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia)**

MCA-Indonesia adalah pelaksana Hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC), yang mendukung Kemitraan Strategis Amerika Serikat dengan Indonesia. MCA-Indonesia bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, dan bertindak sebagai lembaga pengelola tiga proyek utama yakni: (1) Kemakmuran Hijau, (2) Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting, dan (3) Modernisasi Pengadaan.

#### **Tentang Millennium Challenge Corporation (MCC)**

MCC adalah lembaga inovatif dan independen Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan membantu pengentasan kemiskinan secara global. Dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat pada 2004, MCC telah menyalurkan Hibah Compact senilai US\$ 11,2 miliar bagi 27 negara yang berkomitmen pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*), kebebasan ekonomi, dan investasi pada warga negaranya. Hibah Compact bersifat kompetitif, artinya negara calon penerima hibah harus bersaing dalam proses seleksi yang transparan.

MCC memegang *prinsip country-led solutions* dan *country-led implementation*, sehingga negara pelaksana hibah memiliki keleluasaan dan wewenang untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya, serta mengembangkan dan melaksanakan programnya.

#### **Untuk informasi lebih lanjut hubungi:**

MCA-Indonesia:

Nani Saptariani, Spesialis Proyek Kajian Sosial dan Gender, [nani.saptariani@mca-indonesia.go.id](mailto:nani.saptariani@mca-indonesia.go.id),  
081384393434

Bunga Manggiasih, Spesialis Promosi dan Publikasi, [bunga.manggiasih@mca-indonesia.go.id](mailto:bunga.manggiasih@mca-indonesia.go.id),  
081389822640